

EFISIENSI RELATIF PENGGUNAAN DANA DAERAH DALAM RANGKA MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI WILAYAH SUBOSUKAWONOSRATEN TAHUN 2004-2006¹

Oleh : Salman Alfarisy Totalia²

Abstract

The purpose of this study were (1). Analyze the level of relative efficiency of using local funds each regency/city in the region in 2004-2006 SUBOSUKAWONOSRATEN. (2). Providing solutions and reference for the districts and municipalities in the region SUBOSUKAWONOSRATEN in the year 2004-2006 which is still less or not efficient in the allocation of funds in order to achieve maximum efficiency. In accordance with the purpose of this study, the analytical technique used is Data Envelopment Analysis (DEA).

Based on the research that has been done, the conclusions that can be taken in this study were (1). In 2004 the level of maximum efficiency can be achieved by the city of Surakarta, Sukoharjo, Karanganyar, and Klaten Districts with 100% efficiency level. While Boyolali with relative efficiency level of 98.48%, Wonogiri with relative efficiency of 65.65%, and Sragen with relative efficiency of 65.06%. (2). In 2005 the level of maximum efficiency can be achieved by the city of Surakarta, Karanganyar, Sragen and Klaten Districts with 100% efficiency level. While Boyolali with relative efficiency level of 93.98%, Sukoharjo with relative efficiency level of 97.52%, and Wonogiri with relative efficiency of 70.15%. (3). In the year 2006 the level of maximum efficiency can be achieved by the city of Surakarta, and Karanganyar District, with 100% efficiency level. While Boyolali with relative efficiency level of 83.14%, Sukoharjo with relative efficiency level of 93.65%, and Wonogiri with relative efficiency of 57.36%, Sragen with relative efficiency level of 58.59%, and Klaten with relative efficiency level of 96.65%.

Keywords: *Relative Efficient, Data Envelopment Analysis.*

¹ Tesis

² Dosen Prodi Pendidikan Ekonomi FKIP UNS

A. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang terdiri atas provinsi, kabupaten/kota, serta bagian-bagian daerah yang lebih kecil pembangunannya tidak dapat dipisahkan antara pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Pembangunan daerah merupakan pengejawantahan dari pembangunan nasional, dengan asas pemerataan yang berusaha memberikan alokasi pembangunan dari pusat ke daerah untuk mencapai sasaran pembangunan sesuai dengan potensi, karakteristik, sumber daya serta permasalahan yang ada di daerah itu sendiri. Pembangunan yang merata di segala aspek dan di seluruh penjuru daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan cita-cita yang ingin dan akan selalu diraih oleh pemerintah dalam hal ini sebagai pelaksanaan eksekutif. Pembangunan daerah pada hakekatnya adalah pembangunan secara keseluruhan dari serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, peningkatan daya beli dan daya

saing di tingkat regional maupun internasional.

Hampir semua aliran ekonomi sepakat bahwa dalam membangun ekonomi membutuhkan adanya "*capital accumulation*" atau akumulasi modal yang cukup untuk membiayai pembangunan itu sendiri. Pertanyaannya sekarang adalah dari mana daerah memperoleh sumber dana yang cukup untuk membiayai pembangunannya? Machfud Sidik, dkk (2002: 23) menyatakan bahwa transfer dana dari pusat merupakan sumber penerimaan yang amat dominan bagi pemerintah daerah di banyak negara berkembang, tidak terkecuali Indonesia. Sumber ini membiayai sekitar 85% dari pengeluaran pemerintah daerah di Afrika Selatan, antara 67% sampai 95% pengeluaran negara-negara bagian di Nigeria, 70% sampai 90% pengeluaran negara-negara bagian miskin di Mexico, 72% pengeluaran provinsi dan 86% pengeluaran kabupaten/kota pada dekade 1990-an di Indonesia.

Satu alasan yang utama mengapa peran dana transfer dari pusat sedemikian pentingnya untuk pemerintahan daerah adalah untuk menjaga atau menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di

seluruh negara. Perlu diketahui juga bahwa kondisi keuangan dan ekonomi daerah-daerah di banyak negara di dunia cenderung juga tidak merata. Sehingga sangat diperlukan peran pemerintah pusat untuk mengurangi kesenjangan antar daerah tersebut. Maka perlu dibuatlah sebuah desain dari transfer mengingat pentingnya efisiensi dan tercapainya keadilan dalam penyediaan fasilitas dan pelayanan publik, serta kesehatan keuangan pemerintah daerah tentunya. Secara umum semua daerah di Indonesia sudah dan telah mendapat campur tangan dari pemerintah pusat, khususnya dalam hal pendanaan pembangunan daerah. Secara umum pola transfer dari pusat ke daerah bisa dibedakan atas bagi hasil pendapatan (*revenue sharing*) dan bantuan (*grants*). Khusus di Indonesia di era otonomi daerah, transfer tersebut berbentuk Dana Perimbangan, yang terdiri dari Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Penetapan besaran nominal dana transfer dari pusat ke daerah sangatlah bervariasi, mengingat kebutuhan dan kemampuan daerah untuk melaksanakan berbagai fungsi dan pelayanan publik. Dalam

penelitian ini akan diambil beberapa daerah tingkat dua (kabupaten/kota) yang relatif memiliki kesamaan baik dari segi ekonomi, penduduk, geografis dan sejarah. Lokasi yang diambil adalah daerah Eks Karesidenan Surakarta; Solo/Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten, yang biasa disingkat dengan "SUBOSUKAWONOSRATEN".

Berdasarkan fakta, beberapa daerah mencapai pertumbuhan cepat, sementara daerah lain kurang begitu cepat atau bahkan lambat. Sarungu (2008) menyatakan bahwa kemajuan-daerah-daerah tidaklah sama, hal ini dikarenakan perbedaan sumber-sumber yang dimiliki. Perbedaan pertumbuhan ekonomi antar kabupaten/kota tersebut adalah hal yang wajar sebagai akibat perbedaan akumulasi kapital atau investasi di berbagai daerah tersebut. Investor tentunya cenderung memilih daerah perkotaan atau daerah yang memiliki fasilitas seperti prasarana perhubungan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, perbankan, asuransi, unit-unit ekonomi, serta tenaga kerja yang tersedia.

Dengan otonomi, daerah dituntut mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa

mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian (*sharing*) dari pemerintah pusat. Dengan kondisi seperti ini, peranan investasi swasta dan perusahaan milik daerah sangat diharapkan sebagai pemacu utama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi (*engine of growth*). Dari sisi eksternal, daerah dituntut untuk menarik investasi asing agar bersama-sama swasta dalam negeri mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mampu menimbulkan *multiplier effect* yang besar. Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat memberikan keleluasaan kepada daerah dalam pembangunan daerah melalui usaha yang sejauh mungkin mampu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat. Menurut Mardiasmo (2004: 99), Pada dasarnya terkandung tiga misi utama sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi tersebut, yaitu:

1. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat.
3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi

masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

Sejalan dengan upaya untuk memantapkan kemandirian Pemerintah Daerah yang dinamis dan bertanggung jawab, serta mewujudkan pemberdayaan dan otonomi daerah dalam lingkup yang lebih nyata, maka diperlukan upaya meningkatkan efisiensi, efektivitas dan profesionalisme aparatur publik dan lembaga-lembaga publik di daerah dalam mengelola sumber daya daerah. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan profesionalisme dan penerapan prinsip-prinsip dasar dalam pengelolaan daerah. Prinsip-prinsip yang mendasari pengelolaan keuangan daerah tersebut adalah transparansi, akuntabilitas, dan *value for money*. (Mardiasmo, 2004: 105). Lebih lanjut dia menjelaskan transparansi adalah keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran daerah. Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan. *Value for*

money berarti diterapkannya 3 (tiga) prinsip dalam proses penganggaran yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang paling murah. Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat (*public money*) tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal (berdaya guna). Efektivitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan publik. Hal-hal yang dilihat dalam penelitian ini tercakup dalam 2 (dua) hal pokok, dari segi input dan output. Untuk mengukur efisiensi penggunaan dana masing-masing daerah dari segi input adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dari pemerintah pusat serta jumlah penduduk. Sedangkan dari segi output dapat dilihat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihasilkan dengan penggunaan dana daerah tersebut.

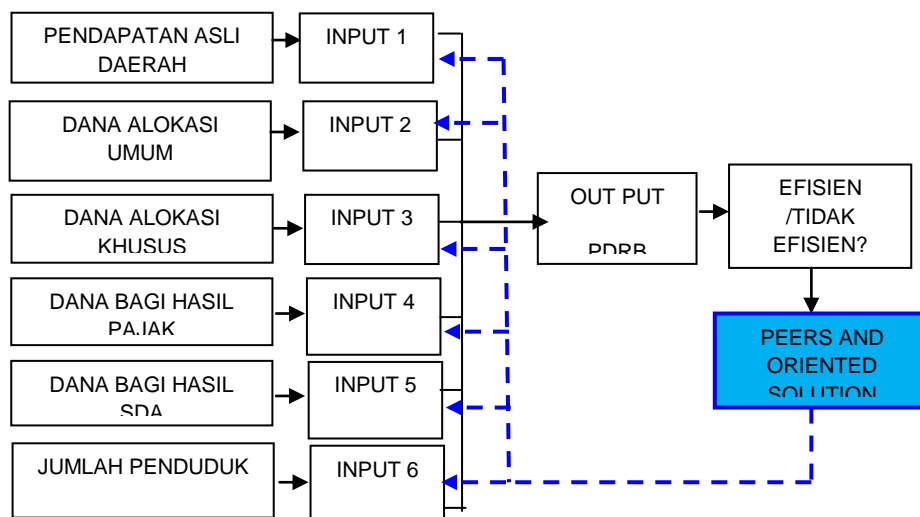
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penulis menetapkan perumusan masalah penelitian ini

adalah;(1).Bagaimana tingkat efisiensi relatif penggunaan dana daerah di masing-masing Kabupaten/Kota di wilayah SUBOSUKAWONOSRATEN pada tahun 2004-2006?, (2).Permasalahan dan solusi apa yang dibutuhkan bagi Kabupaten/Kota yang masih kurang atau belum efisien menggunakan dana daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonominya?. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut; (1).Menganalisis tingkat efisiensi relatif penggunaan dana daerah masing-masing Kabupaten/Kota di wilayah SUBOSUKAWONOSRATEN pada tahun 2004-2006, (2).Memberikan solusi dan rujukan bagi Kabupaten/Kota di wilayah SUBOSUKAWONOSRATEN pada tahun 2004-2006 yang masih kurang atau belum efisien dalam penggunaan alokasi dananya agar mencapai efisiensi maksimal.

Tujuan pembangunan daerah selalu mengacu pada tujuan pembangunan nasional, mensejahterakan rakyat dan pemerataan pendapatan. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi hampir semua aliran ekonomi sepakat membutuhkan adanya

akumulasi modal, yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Salah satu sumber modal daerah adalah dengan memaksimalkan sumber daya di daerah, dana transfer, dan dana lain yang sah. Sebagai gambaran umum daerah yang memiliki dana besar akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang pesat, begitu pula sebaliknya. Tetapi pada kenyataannya belum tentu dengan dana yang besar mampu meningkatkan pertumbuhan ekonominya, sebaliknya dengan dana yang relatif kecil justru mampu meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Dana Kabupaten/Kota

di wilayah SUBOSUKAWONOSRATEN dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP), Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBHSDA). Sedangkan penduduk dalam hal ini merupakan objek pembangunan yang biasa diukur dengan pertumbuhannya melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sehingga kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dibuat dalam bentuk gambar sebagai berikut:



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

B. PEMBAHASAN

Metode Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Lebih lanjut

Kuncoro (2003:8) menjelaskan penelitian deskriptif meliputi pengumpulan data untuk diuji hipotesis, dalam penelitian deskriptif

berupaya memperoleh deskripsi yang lengkap dan akurat dari suatu situasi. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber data. Sumber data yang digunakan adalah bersumber dari Biro Pusat Statistik (BPS), DIPENDA (Dinas Pendapatan Daerah), dan berbagai sumber lain yang mampu mendukung data penelitian. Data yang digunakan adalah data kurun waktu (*time series*) tahun 2004-2006, maupun silang tempat (*cross section*) antar kabupaten/kotamadya di kawasan SUBOSUKAWONOSRATEN.

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam satuan rupiah. Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. (UU Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6). Selanjutnya dalam analisis *DEA (Data Envelopment Analysis)* disebut dengan INPUT 1.
2. Dana Alokasi Umum (DAU) dalam satuan rupiah. Dana

Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. (UU Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 1). Selanjutnya dalam analisis *DEA (Data Envelopment Analysis)* disebut dengan INPUT 2.

3. Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam satuan rupiah. Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. (UU Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 1). Selanjutnya dalam analisis *DEA (Data Envelopment Analysis)* disebut dengan INPUT 3.
4. Dana Bagi Hasil Pajak dalam satuan rupiah. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas (a). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), (b). Bea

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan (c). Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21. (UU Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 11). Selanjutnya dalam analisis *DEA (Data Envelopment Analysis)* disebut dengan INPUT 4.

5. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBHSDA) dalam satuan rupiah. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam berasal dari:(a). kehutanan, (b). pertambangan umum, (c). perikanan, (d). pertambangan minyak bumi, (e). pertambangan gas bumi; dan (f). pertambangan panas bumi. (UU Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 11). Selanjutnya dalam analisis *DEA (Data Envelopment Analysis)* disebut dengan INPUT 5.
6. Variabel yang digunakan untuk melihat besarnya penetapan Dana Perimbangan serta kemampuan daerah dalam mencapai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) maksimal adalah jumlah penduduk. Maka dalam penelitian ini jumlah penduduk secara keseluruhan sebagai

objek pembangunan dari masing-masing daerah merupakan INPUT 5.

7. Variabel yang digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi daerah se-eks Karesidenan Surakarta adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dari masing-masing daerah. Maka dalam penelitian ini PDRB masing-masing daerah merupakan OUTPUT. Produk Domestik Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah/wilayah dalam suatu periode tertentu. PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah (*value added*) yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha atau jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit kegiatan ekonomi dalam suatu daerah/wilayah. Secara kuantitatif PDRB merupakan nilai barang dan jasa, oleh karena itu PDRB dihitung atas dasar harga berlaku (*at current price*) dan PDRB atas dasar harga konstan (*at constant price*). PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk melihat perubahan struktur

ekonomi, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi riil.

Sesuai dengan tujuan dari penelitian ini, untuk mengetahui tingkat efisiensi dan memberikan solusi rujukan bagi daerah yang belum mencapai tingkat efisiensi. Maka teknik analisis yang tepat digunakan adalah dengan menggunakan *Data Envelopment Analysis (DEA)*. DEA adalah teknik *linear programming* untuk mengukur bagaimana sebuah DMU (*decision making unit*, dalam penelitian ini daerah di kawasan SUBOSUKAWONOSRATEN) beroperasi secara relatif dibandingkan dengan daerah lain dalam sampel yang digunakan (Setyawan, 2003). DEA pada dasarnya adalah sebuah pendekatan *non parametric*. Kuosmanen and Post (2002) dalam *Palgrave Macmillan Journals and Operational Research Society* menyatakan definisi dan fungsi dari *Data Envelopment Analysis (DEA)* sebagai berikut: "*Data Envelopment*

Analysis (DEA) is an efficiency measurement and performance benchmarking technique that has been recognised as a valuable analytical research instrument and a practical decision support tool". Secara singkat DEA ini dapat dikatakan sebagai sebuah alat yang khusus digunakan untuk mengukur efisiensi antar input dan output, sebagaimana yang dikemukakan oleh Sengupta (1996), "*The DEA model sets up a linear programming model to compare the relative efficiency of a reference unit in relation to the others in the sample. The reference unit DM1k is said to be technically efficient if and only if it is not possible to improve any of its inputs or outputs without worsening some of its other inputs or output*". DEA bisa digunakan sebagai alat pengukur efisiensi pada perusahaan maupun jasa untuk mengevaluasi dalam rangka peningkatan kinerja dari perusahaan maupun badan pelayanan publik, hal ini sebagaimana yang disampaikan Srinivas Talluri (2000) dalam *Decision Line*:

"Data envelopment analysis (DEA) is receiving increasing importance as a tool for evaluating and improving the performance of manufacturing and service operations. It has been extensively applied

in performance evaluation and benchmarking of schools, hospitals, bank branches, production plants, etc. DEA is a multi-factor productivity analysis model for measuring the relative efficiencies of a homogenous set of decision making units (DMUs). The efficiency score in the presence of multiple input and output factors is defined as:

$$\text{Efficiency} = \frac{\text{Weighted of sum of outputs}}{\text{Weighted of sum of inputs}}$$

Formulasi fungsi tujuan ditunjukkan sebagai berikut:

Maksimumkan:

$$Z_k = \frac{\sum_{r=1}^s u_{rk} \cdot Y_{rk}}{\sum_{i=1}^s v_{ik} \cdot X_{ik}} \quad (1)$$

Kriteria universalitas efisiensi lebih besar dari 1 atau 100% mensyaratkan DMU k untuk memilih jika DMU lain menggunakan bobot dengan kendala tidak ada yang dipilih oleh DMU k. Sehingga DMU lain yang akan memiliki formulasi selanjutnya:

$$Z_k = \frac{\sum_{r=1}^s u_{rk} \cdot Y_{rk}}{\sum_{i=1}^s v_{ik} \cdot X_{ik}} \leq 1 \quad ; j = 1, \dots, n \quad (2)$$

Bobot yang dipilih tidak boleh bernilai negatif:

$$U_{rk} \geq 0 ; r = 1, \dots, s \quad (3)$$

$$V_{ik} \geq 0 ; i = 1, \dots, m \quad (4)$$

Keterangan:

Z	: efisiensi relative	i	: input i
n	: jumlah DMU (daerah)	r	: output r
m	: jenis input	k	: unit ekonomi k
s	: jenis output	j	: unit ekonomi j
x	: jumlah input	V,U	: bobot/ukuran
y	: jumlah output		

Kriteria efisien dan tidak efisien:

$$\text{Efficiency} = \frac{\text{Weighted of sum of outputs}}{\text{Weighted of sum of inputs}} = 100\%$$

Dan

$$\text{Inefficiency} = \frac{\text{Weighted of sum of outputs}}{\text{Weighted of sum of inputs}} \neq 100\%$$

Hasil Penelitian

Secara keseluruhan hasil penelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

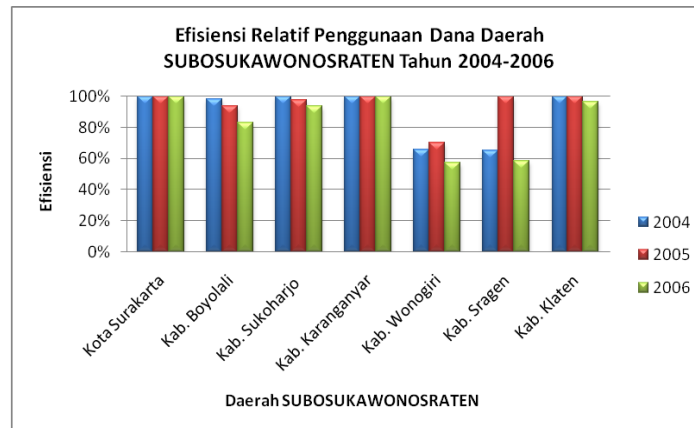
Tabel 1 Rekapitulasi efisiensi relatif daerah
SUBOSUKAWONOSRATEN Tahun 2004-2006 (dalam %)

DAERAH	2004	2005	2006
Kota Surakarta	100	100	100
Kab. Boyolali	98,48	93,98	83,14
Kab. Sukoharjo	100	97,52	93,65
Kab. Karanganyar	100	100	100
Kab. Wonogiri	65,65	70,15	57,36
Kab. Sragen	65,06	100	58,59
Kab. Klaten	100	100	96,65

Tabel 2 Trend efisiensi relatif daerah
SUBOSUKAWONOSRATEN Tahun 2004-2006 (dalam %)

DAERAH	2004	r	2005	r	2006
Surakarta	100	0.00	100	0.00	100
Boyolali	98.48	-4.79	93.98	-13.04	83.14
Sukoharjo	100	-2.54	97.52	-4.13	93.65
Karanganyar	100	0.00	100	0.00	100
Wonogiri	65.65	6.41	70.15	-22.30	57.36
Sragen	65.06	34.94	100	-70.68	58.59
Klaten	100	0.00	100	3.47	96.65

Gambar 2 Grafik Efisiensi Relatif Penggunaan Dana Daerah SUBOSUKAWONOSRATEN Tahun 2004-2006



C. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) *Level Of Relative Efficient*

a. Berdasarkan hasil penelitian. tahun 2004 *level of relative efficient* dari daerah SUBOSUKAWONOSRATEN adalah sebagai berikut:

- 1) Kota Surakarta 100%
- 2) Kabupaten Boyolali 98,48%
- 3) Kabupaten Sukoharjo 100%
- 4) Kabupaten Karanganyar 100%
- 5) Kabupaten Wonogiri 65,65%

6) Kabupaten Sragen 65,06%

7) Kabupaten Klaten 100%

b. Berdasarkan hasil penelitian. tahun 2005 *level of relative efficient* dari daerah SUBOSUKAWONOSRATEN adalah sebagai berikut:

- 1) Kota Surakarta 100%
- 2) Kabupaten Boyolali 93,98%
- 3) Kabupaten Sukoharjo 97,52%
- 4) Kabupaten Karanganyar 100%
- 5) Kabupaten Wonogiri 70,15%
- 6) Kabupaten Sragen 100%
- 7) Kabupaten Klaten 100%

c. Berdasarkan hasil penelitian. tahun 2006 *level of relative efficient* dari daerah

SUBOSUKAWONOSRATEN

adalah sebagai berikut:

- 1) Kota Surakarta 100%
- 2) Kabupaten Boyolali 83,14%
- 3) Kabupaten Sukoharjo 93,65%
- 4) Kabupaten Karanganyar 100%
- 5) Kabupaten Wonogiri 57,36%
- 6) Kabupaten Sragen 58,59%
- 7) Kabupaten Klaten 96,65%

2) PATTERN/TREND OF RELATIVE EFFICIENT

Berdasarkan hasil penelitian. *pattern/trend of relative efficient* dari daerah SUBOSUKAWONOSRATEN adalah sebagai berikut:

a. Surakarta

Trend efisiensi relatif Kota Surakarta secara keseluruhan tetap/stabil, artinya Kota Surakarta relative stabil dalam mempertahankan tingkat efisiensi relatifnya dalam 100%.

b. Boyolali

Trend efisiensi relatif Kabupaten Boyolali menurun sekitar 4,79% dari tahun 2004 ke tahun 2005. Sedangkan dari tahun 2005 ke tahun 2006 juga mengalami penurunan sekitar 13,04%.

c. Sukoharjo

Trend efisiensi relatif Kabupaten Sukoharjo menurun sekitar 2,54% dari tahun 2004 ke tahun 2005. Sedangkan dari tahun 2005 ke tahun 2006 juga mengalami penurunan sekitar 4,13%.

d. Karanganyar

Trend efisiensi relatif Kabupaten Karanganyar secara keseluruhan tetap/stabil, artinya Kabupaten Karanganyar relative stabil dalam mempertahankan tingkat efisiensi relatifnya dalam 100%.

e. Wonogiri

Trend efisiensi relatif Kabupaten Wonogiri meningkat sekitar 6,41% dari tahun 2004 ke tahun 2005. Sedangkan dari tahun 2005 ke tahun 2006 justru

mengalami penurunan sekitar 22,30%.

f. Sragen

Trend efisiensi relatif Kabupaten Sragen meningkat sekitar 34,94% dari tahun 2004 ke tahun 2005. Sedangkan dari tahun 2005 ke tahun 2006 justru mengalami penurunan sekitar 70,68%.

g. Klaten

Trend efisiensi relatif Kabupaten Klaten stabil dari tahun 2004 ke tahun 2005. Sedangkan dari tahun 2005 ke tahun 2006 justru mengalami penurunan sekitar 3,47%.

3) PEERS AND TARGET VALUES

a. Berdasarkan hasil penelitian. tahun 2004 *peers and target values* dari daerah SUBOSUKAWONOSRATEN adalah sebagai berikut:

1) Kota Surakarta

Kota Surakarta pada tahun 2004 sudah mencapai tingkat efisiensi relatif 100% sehingga Kota Surakarta tidak mempunyai *Peers and Target Values*.

2) Kabupaten Boyolali

Kabupaten Boyolali pada tahun 2004 belum mencapai tingkat efisiensi relatif 100% sehingga Kabupaten Boyolali harus mengambil Kabupaten Karanganyar sebagai *Peers and Target Values*.

3) Kabupaten Sukoharjo

Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2004 sudah mencapai tingkat efisiensi relatif 100% sehingga Kabupaten Sukoharjo tidak mempunyai *Peers and Target Values*.

4) Kabupaten Karanganyar 100%

Kabupaten Karanganyar pada tahun 2004 sudah mencapai tingkat efisiensi relatif 100% sehingga Kabupaten Karanganyar tidak mempunyai *Peers and Target Values*.

5) Kabupaten Wonogiri

Kabupaten Wonogiri pada tahun 2004 belum mencapai tingkat efisiensi relatif 100% sehingga Kabupaten Wonogiri harus mengambil Kabupaten Karanganyar

sebagai *Peers and Target Values*.

6) Kabupaten Sragen 100% Kabupaten Sragen pada tahun 2004 belum mencapai tingkat efisiensi relatif 100% sehingga Kabupaten Sragen harus mengambil Kabupaten Karanganyar sebagai *Peers and Target Values*.

7) Kabupaten Klaten 100% Kabupaten Klaten pada tahun 2004 sudah mencapai tingkat efisiensi relatif 100% sehingga Kabupaten Klaten tidak mempunyai *Peers and Target Values*.

b. Berdasarkan hasil penelitian. tahun 2005 *peers and target values* dari daerah SUBOSUKAWONOSRATEN adalah sebagai berikut:

1) Kota Surakarta Kota Surakarta pada tahun 2005 sudah mencapai tingkat efisiensi relatif 100% sehingga Kota Surakarta tidak mempunyai *Peers and Target Values*.

2) Kabupaten Boyolali Kabupaten Boyolali pada tahun 2005 belum mencapai tingkat efisiensi relatif 100% sehingga Kabupaten Boyolali harus mengambil Kabupaten Karanganyar sebagai *Peers and Target Values*.

3) Kabupaten Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2005 belum mencapai tingkat efisiensi relatif 100% sehingga Kabupaten Sukoharjo harus mengambil Kota Surakarta dan/atau Kabupaten Karanganyar sebagai *Peers and Target Values*.

4) Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar pada tahun 2005 sudah mencapai tingkat efisiensi relatif 100% sehingga Kabupaten Karanganyar tidak mempunyai *Peers and Target Values*.

5) Kabupaten Wonogiri Kabupaten Wonogiri pada tahun 2005 belum mencapai tingkat efisiensi relatif 100% sehingga Kabupaten Wonogiri

harus mengambil Kota Surakarta dan/atau Kabupaten Karanganyar sebagai *Peers and Target Values*.

6) Kabupaten Sragen

Kabupaten Sragen pada tahun 2005 sudah mencapai tingkat efisiensi relatif 100% sehingga Kabupaten Sragen tidak mempunyai *Peers and Target Values*.

7) Kabupaten Klaten

Kabupaten Klaten pada tahun 2005 sudah mencapai tingkat efisiensi relatif 100% sehingga Kabupaten Klaten tidak mempunyai *Peers and Target Values*.

c. Berdasarkan hasil penelitian. tahun 2006 *peers and target values* dari daerah SUBOSUKAWONOSRATEN adalah sebagai berikut:

1) Kota Surakarta

Kota Surakarta pada tahun 2006 sudah mencapai tingkat efisiensi relatif 100% sehingga Kota Surakarta tidak mempunyai *Peers and Target Values*.

2) Kabupaten Boyolali

Kabupaten Boyolali pada tahun 2006 belum mencapai tingkat efisiensi relatif 100% sehingga Kabupaten Boyolali harus mengambil Kabupaten Karanganyar sebagai *Peers and Target Values*.

3) Kabupaten Sukoharjo

Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2006 belum mencapai tingkat efisiensi relatif 100% sehingga Kabupaten Sukoharjo harus mengambil Kota Surakarta dan/atau Kabupaten Karanganyar sebagai *Peers and Target Values*.

4) Kabupaten Karanganyar

Kabupaten Karanganyar pada tahun 2006 sudah mencapai tingkat efisiensi relatif 100% sehingga Kabupaten Karanganyar tidak mempunyai *Peers and Target Values*.

5) Kabupaten Wonogiri

Kabupaten Wonogiri pada tahun 2006 belum mencapai tingkat efisiensi relatif 100% sehingga Kabupaten Wonogiri

harus mengambil Kabupaten Karanganyar sebagai *Peers and Target Values*.

- 6) Kabupaten Sragen Kabupaten Sragen pada tahun 2006 belum mencapai tingkat efisiensi relatif 100% sehingga Kabupaten Sragen harus mengambil Kabupaten Karanganyar sebagai *Peers and Target Values*.

sebagai berikut:

1. Kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar hendaknya mampu mempertahankan tingkat efisiensi maksimalnya, selama tahun penelitian (2004-2006) dua daerah ini mampu mencapai efisien maksimum 100%, karena kita ketahui bersama bahwa mempertahankan adalah pekerjaan yang sulit apabila dibanding hanya sekedar meraih. Keduanya harus tetap mempertahankan proporsi Input; Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil (Pajak dan SDA), serta jumlah penduduknya. Di sisi lain keduanya juga harus menjaga

- 7) Kabupaten Klaten Kabupaten Klaten pada tahun 2006 belum mencapai tingkat efisiensi relatif 100% sehingga Kabupaten Klaten harus mengambil Kabupaten Karanganyar sebagai *Peers and Target Values*.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas peneliti mengemukakan saran proporsi outputnya; Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

2. Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Klaten sebaiknya mengambil *reference set & peers of target* Kota Surakarta dan/atau Kabupaten Karanganyar sehingga mampu mencapai tingkat efisiensinya secara maksimal (100%).

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, R. David, Dennis J. Sweeney, Thomas A. Williams. (1996). *Manajemen Sains; Pendekatan Kuantitatif Untuk Pengambilan Keputusan Manajemen*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tahun 2004-2006*.
- Badan Pusat Statistik Kota Surakarta. *Surakarta Dalam Angka Tahun 2004*.
- Badan Pusat Statistik Kota Surakarta. *Surakarta Dalam Angka Tahun 2005*.
- Badan Pusat Statistik Kota Surakarta. *Surakarta Dalam Angka Tahun 2006*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali. *Boyolali Dalam Angka Tahun 2004*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali. *Boyolali Dalam Angka Tahun 2005*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali. *Boyolali Dalam Angka Tahun 2006*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo. *Sukoharjo Dalam Angka Tahun 2004*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo. *Sukoharjo Dalam Angka Tahun 2005*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo. *Sukoharjo Dalam Angka Tahun 2006*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonogiri. *Wonogiri Dalam Angka Tahun 2004*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonogiri. *Wonogiri Dalam Angka Tahun 2005*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonogiri. *Wonogiri Dalam Angka Tahun 2006*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sragen. *Sragen Dalam Angka Tahun 2004*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sragen. *Sragen Dalam Angka Tahun 2005*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sragen. *Sragen Dalam Angka Tahun 2006*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten. *Klaten Dalam Angka Tahun 2004*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten. *Klaten Dalam Angka Tahun 2005*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten. *Klaten Dalam Angka Tahun 2006*.
- Basri, Faisal (2001). *Perekonomian Indonesia: Tantangan Dan Harapan Bagi Kebangkitan Ekonomi Indonesia*. Jakarta: penerbit Erlangga.
- Charnes, A., et. Al. (1981): "Evaluating Program and Managerial Efficiency: An Application of Data Envelopment Analysis to Program Follow Through". *Management Science Vol. 27, No. 6. page:106-110*.
- Dana Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia Tahun 2004-2006. Diakses dari: http://www.dirjen_perimbangan_keuangan_daerah_republik_indonesia.go.id. Diakses pada tanggal 14 Juli 2009 jam 10.00 WIB.
- Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia Tahun 2004-2006. Diakses dari: http://www.dirjen_perimbangan_keuangan_daerah_republik_indonesia.go.id. Diakses pada tanggal 14 Juli 2009 jam 10.00 WIB.
- Dewi, Elita. (2002). Identifikasi Sumber Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Skripsi tidak dipublikasikan*. Sumatera Utara: FISIPOLUSU.

- Dornbusch, Rudriger. (1998). *Macro Economics*. Seventh Edition. New York: Mc Graw-Hill Companies.
- Elfira, Rika. (2005). *Analisis Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Disparitas Pendapatan Antar Daerah Pasca Desentralisasi FIS*. Bandung: FEUNPAD.
- Gujarati, Damodar. (1993). *Ekonometrika Dasar*. Jakarta: Erlangga.
- Hadad. D. Muliaman. dkk (2003). Pendekatan Parametrik Untuk Efisiensi Perbankan Indonesia. *JEL Classification: G21, C34. Vol. December 2003, page2-3.*
-
- An alisis Efisiensi Industri Perbankan Indonesia :Penggunaan Metode Nonparametrik Data Envelopment Analysis (DEA). *JEL Classification: G21, C34, Vol. December 2003,page2-3.*
- Herlambang, Sutopo. (2001). *Ekonomi Makro Teori, Analisis dan Kebijakan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Irawan, Muhammad, Suparmoko. (2002). *Ekonomika Pembangunan*. Yogyakarta: BPFEUGM.
- and T Post. (2002). Quadratic Data Envelopment Analysis. *Source: The Journal of the Operational Research Society, Vol. 53, No. 11 (Nov., 2002), pp. 1204 - 1214.*
- Lincoln, Arsyad. (1999). *Pengantar Perencanaan Dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: BPFE.
- Mala, Lilik Khairul.(2004). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pengalokasian Anggaran. Tersedia pada http://www.unissula.ac.id/pe_r pustakaan. Diakses pada tanggal 17 Juli 2009 jam 10.00 WIB.
- Mulyana, Dedi. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mardiasmo. (2004). *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Riyadi dkk. (2005). *Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sabandi, Muhammad. (2005). *Teknik Pengolahan Data*. Surakarta: PSPE FKIP UNS.
- Samudro, Bhimo Rizki, Akhmad Daerobi. (2007). *Lab Analisis Pembangunan: Metode Data Envelopment Analysis (DEA) Aplikasi CMOM*. Surakarta: FEUNS.
- Santoso, Singgih. (2002). *SPSS: Statistik Parametrik*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Sarungu, J.J. (2008). Pola Penyebaran Spasial Investasi di Indonesia: Sebuah Pelajaran dari Masa Lalu. *Jurnal Ekonomi*

- Pembangunan Vol. 9, No. 1, hal. 61-71.
- , Uma. (2006). *Research Methods For Bussines: Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: PT Salemba Empat.
- Sengupta, Jati K. (1996). The Efficiency Distribution Approach in Data Envelopment Analysis: An Application. *Source: The Journal of the Operational Research Society, Vol. 47, No. 11 (Nov., 1996), pp. 1387-1397.*
- Setyawan, Anton Agus (2004). Pengukuran Kinerja Keuangan BUMD Dengan Metode DEA (Studi Empirik Pada BKK Kabupaten Sragen). *Skripsi tidak dipublikasikan*. Surakarta: FEUMS.
- Sidik, Machfud, B. Raksaka Mahi, Robert A. Simanjutak, Bambang Brodjonegoro. (2002). *Dana Alokasi Umum: Konsep, Hambatan, Dan Prospek Di Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Sofwani, Achmad. (2008). Mobilisasi Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Rangka Pembangunan Daerah (Studi Di Kabupaten Muara Enim). *Skripsi tidak dipublikasikan*. Malang: FE UNIBRAW.
- Sudaryanto, Budi. (2006). Analisis Efisiensi Kinerja Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Dengan Data Envelopment Analysis (DEA): Studi Di Kabupaten Pati Dan Kabupaten Rembang Jawa Tengah. *Empirika, Vol. 19* No. 1, Juni 2006. Semarang: FEUNDIP.
- Talluri, Srinivas (2000). Data Envelopment Analysis: Models and Extensions. *Decision Line, Silberman College of Business Administration, Fairleigh Dickinson University & Pennsylvania State University. May 2000. Page 8.*
- Taylor, Brian and Geoff Harris. (2004). Relative Efficiency among South African Universities: A Data Envelopment Analysis. *Source: Higher Education, Vol. 47, No. 1 (Jan., 2004), pp. 73-89.*
- Todaro, Michael (1981). *Economics For A Developing World*. Longman (1981), page.96-97.
- _____ (2000). *Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga*. Edisi Ketujuh. Jilid 1. Jakarta: Erlangga.
- Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.